BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

NOMOR : 0020/HM.00.02/K.SN-02/07/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan ketententuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru perlu menetapkan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk daftar informasi publik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, di pandang perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
10. Surat Edaran Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR: 0020/HM.00.02/K.SN-02/07/2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mencabut keputusan sebelumnya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 20 Juli 2026

K E T U A

N A J E M U D D I N

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barru
Nomor : 0020/HM.00.02/K.SN-02/07/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

No.	Ringkasan isi Informasi	Unit yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau pembuatan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hard copy	Soft copy	
A. INFORMASI BERKALA							
1	Profil PPID Bawaslu	PPID & Humas	PPID & Humas	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Visi dan Misi Bawaslu	PPID & Humas	PPID & Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
3	Tugas dan Fungsi Bawaslu	PPID & Humas	PPID & Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
4	Sejarah Pengawasan Pemilu	PPID & Humas	PPID & Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
5	Struktur Organisasi	PPID & Humas	PPID & Humas	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
6	Profil Singkat Ketua dan Anggota bawaslu Kab. Barru Periode 2023-2028	PPID & Humas	PPID & Humas	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
7	Profil Singkat Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Barru	PPID & Humas	PPID & Humas	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
8	Profil Singkat Kepala Subbagian Bawaslu Kab. Barru	PPID & Humas	PPID & Humas	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
9	Data Jumlah Pegawai PPNPN Bawaslu Kab Barru	PPID & SDMODD	PPID & SDMODD	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
10	Alamat Lengkap Bawaslu Kab Barru	PPID & Humas	PPID & Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
11	Data Jumlah PNS Lingkup Bawaslu Kab. Barru	PPID & SDMODD	PPID & SDMODD	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
12	Data Pengawas Adhoc	PPID & SDMODD	PPID & SDMODD	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
13	Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barru Nomor : 0037/HK.01.01/K.SN-02/10/2022 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kab. Barru .	Divisi SDMODD	Divisi SDMODD	2022	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
14	Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru Nomor : 0042/HK.01.01/SN-02/11/2022 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat dan Tenaga Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kab. Barru	Divisi SDMODD	Divisi SDMODD	2022	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
15	Data Hasil Pengawasan	Divisi HPPH, SDMODD, dan PPPS	Divisi HPPH, SDMODD, dan PPPS	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
16	Data Jumlah Penanganan Pelanggaran	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
17	Data Jumlah Penyelesaian Sengketa	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
18	Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 0051/	Divisi SDMODD	Divisi SDMODD	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

No.	Ringkasan isi Informasi	Unit yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau pembuatan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hard copy	Soft copy	
	HK.01.01/K.SN-02/05/2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Barru						
19	Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru Nomor : 0063/HK.01.01/SN-02/05/2024 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat dan Tenaga Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se- Kab. Barru	Divisi SDMODD	Divisi SDMODD	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
20	Data Hasil Pengawasan	Divisi HPPH, SDMODD, dan PPPS	Divisi HPPH, SDMODD, dan PPPS	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
21	Data Jumlah Penanganan Pelanggaran	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
22	Data Jumlah Penyelesaian Sengketa	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
23	Data Jumlah Pegawai PPNPN Bawaslu Kab Barru	PPID & SDMODD	PPID & SDMODD	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
24	Data Jumlah PNS Lingkup Bawaslu Kab. Barru	PPID & SDMODD	PPID & SDMODD	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
25	Data Pengawas Adhoc	PPID & SDMODD	PPID & SDMODD	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
26	Nomor: 0038/PM.00.02/K.SN-02/12/2025 Imbauan Bawaslu Kabupaten Barru Kepada Kpu Kabupaten Barru Terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.			2025	✓	✓	
27	Nomor: 0036/PM.00.02/K.SN-02/12/2025 Imbauan Bawaslu Kabupaten Barru Kepada Kpu Kabupaten Barru Terkait Pemutakhiran Dan Pemeliharaan Data Pemilih Secara Berkelanjutan Atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Pdpb) Tingkat Kabupaten Barru.			2025	✓	✓	
28	Nomor: 0009/HK.04.01/K.SN-02/11/2025 Imbauan Bawaslu Kabupaten Barru Kepada Kpu Kabupaten Barru Terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.			2025	✓	✓	
29	Nomor: 0027/PM.00.02/K.SN-02/11/2025 Imbauan Bawaslu Kabupaten Barru Kepada Kpu Kabupaten Barru Terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.			2025	✓	✓	
30	Nomor: 0026/PM.00.02/K.SN-02/09/2025 Imbauan Bawaslu Kabupaten Barru Kepada Kpu Kabupaten Barru Terkait Pemutakhiran Dan Pemeliharaan Data Pemilih Secara Berkelanjutan Atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Pdpb) Tingkat Kabupaten Barru.			2025	✓	✓	
31	Nomor: 0002/PM.00.02/K.SN-02/06/2025 Imbauan Bawaslu Kabupaten Barru Kepada Kpu Kabupaten Barru Terkait Pemutakhiran Dan Pemeliharaan Data Pemilih Secara			2025	✓	✓	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

No.	Ringkasan isi Informasi	Unit yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau pembuatan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hard copy	Soft copy	
	Berkelanjutan Atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Pdpb) Tingkat Kabupaten Barru.						
32	Nomor: 0017/PM.04/K.SN-02/09/2025 Perjanjian Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Dengan Smas Muhammadiyah Takkalasi Barru Tentang Pendidikan Pengawasan Kepemiluan Dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif			2025	✓	✓	
33	Nomor: 0024/PM.04/K.SN-02/09/2025 Perjanjian Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Dengan Smk Negeri 5 Barru Tentang Pendidikan Pengawasan Kepemiluan Dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.			2025			
34	Nomor: 0005/HM.02.02/K.SN-02/08/2025 Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Dengan Kementerian Agama Kabupaten Barru Tentang Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Pendidikan Politik Dan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula Dalam Lingkup Madrasah Aliah Negeri Dan Madrasa Aliah Swasta Di Kabupaten Barru.			2025	✓	✓	
35	Nomor: 0028/PM.00.02/K.SN-02/11/2025 Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Barru.			2025	✓	✓	
36	Nomor: 0003/PM.00.02/K.SN-02/07/2025 Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan			2025	✓	✓	
37	Nomor: 0002/HK.01.01/K.SN-02/01/2025 Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru			2025	✓	✓	
38	Nomor: 0003a/PL.09/SN-02/01/2025 Penetapan User Supervisor, Koordinator Dan Analis Pada Aolikasi Sistem Aplikasi Manajemen Negara (Siman) Versi 2.0 Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Barru.			2025	✓	✓	
39	Nomor: 0001/PM.00.02/K.SN-02/01/2026 Perubahan Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.			2026	✓	✓	
40	Nomor: 0002/HK.01.01/K.SN-02/01/2026 Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0004/Hk.01.01/K.Sn-02/01/2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru			2026	✓	✓	
41	Nomor : 0001/HK.01.01/K.SN-02/01/2026			2026	✓	✓	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

No.	Ringkasan isi Informasi	Unit yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau pembuatan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hard copy	Soft copy	
	Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026						
B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT							
1	Nomor: 0003/K.SN/HM.02.00/6/2021 Tentang Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Tahun 2021	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2021	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Nomor: 0004/K.SN/HM.02.00/6/2021 Tentang Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru denganPemerintah Desa Bojo Tahun 2021	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2021	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
3	Nomor: 011/K.SN/HM.02.00/9/2021 Tentang Kerjasama Antar Lembaga dalam Rangka Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula dalam Lingkup Madrasah Aliah Negeri dan Madrasah Aliah Swasta di Kabupaten Barru	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2021	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
4	Nomor: 0002/PM.04/K.SN/03/2022 Tentang Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang bersama Desa Lipukasi	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2022	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
5	Nomor: 0004/PM.04/K.SN/03/2022 Tentang Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang bersama Desa Tellumpanua	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2022	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
6	Nomor: 0013/PM.04/K.SN/06/2022 Tentang Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang bersama Desa Lampoko	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2022	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
7	Nomor: 0019/HM.02.04/K.SN-02/08/2022 Tentang Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dengan Badan Pengawas Pemlihan Umum Kabupaten Barru Tentang Peningkatan SDM Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2022	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
8	Nomor: 015/PM.04/K.SN/06/2022 Tentang Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang bersama Desa Balusu	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2022	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
9	Data Regulasi Badan Pengawas Pemilihan Umum	Divisi HPPH, SDMODD, dan PPPS	Divisi HPPH, SDMODD, dan PPPS	2023	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
10	Perjanjian Kerjasama Badan	Divisi	Divisi HPPH	2024	✓	✓	Sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

No.	Ringkasan isi Informasi	Unit yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau pembuatan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hard copy	Soft copy	
	Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Barru Nomor 0048/HM.02.03/K.SN/7/2024 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Barru dalam rangka Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat	HPPH					Retensi Arsip
11	Perjanjian Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Barru 0065/HM.02.03/K.SN.02/8/2024 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Barru dalam rangka Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat.	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
12	Perjanjian Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Karang Taruna Kabupaten Barru 0070/HK.02/SN.02/7/2024 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Barru dalam rangka Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat.	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
13	Perjanjian Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Barru 0082/HK.02/SN.02/7/2024 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Barru dalam rangka Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat.	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
14	Perjanjian Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Pemerintah Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Nomor 0057/K.SN/HM.02.00/07/2024 tentang Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang pada Pemilu/Pemilihan.	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
C. INFORMASI SERTA MERTA							
1	Putusan Pidana Pemilu Nomor 43/PID.SUS/2019PN-BAR Tahun 2019 Tentang Putusan Pidana Dengan Dugaan Pelanggaran Perbuatan yang Menguntungkan Salah Satu Calon	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2019	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
2	Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2019	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

No.	Ringkasan isi Informasi	Unit yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau pembuatan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hard copy	Soft copy	
	001/ADM/LP/PL/BWSL/27.24/IV/ 2019 Tahun 2019 Tentang KPPS Tidak Melakukan Proses Verifikasi Data Pemlih dengan Benar (Pelanggaraan Penggunaan Hak Suara Bagi Pemilih yang Tidak Berhak)						
3	Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 001/ADM/TM/PL/BWSL/27.24/IV/ 2019 Tahun 2019 Tentang KPU Tidak Melakukan Verifikasi Data Pemilih Dengan Benar (Terjadinya Kesalahan Hak Pilih)	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2019	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
4	Putusan Pidana Pemilihan Nomor 117/PID.SUS/2020/PN-BAR Tahun 2020 Tentang Putusan Pidana Dugaan Pelanggaran Pengerusakan APK	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2020	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
5	Putusan Pidana Pemilihan Nomor 114/PID.SUS/2020/PN-BAR Tahun 2020 Tentang Putusan Pidana Dengan Dugaan Pelanggaran Pengerusakan APK	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2020	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
6	Pengumuman tentang Barang Dugaan Pelanggaran	Divisi PPPS	Divisi PPPS	2021	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip
7.	Data Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan serta TPS Rawan	Divisi HPPH	Divisi HPPH	2024	✓	✓	Sesuai dengan Retensi Arsip

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 20 Juli 2026
K E T U A

N A J E M U D D I N

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru